

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi wilayah tidak selamanya diikuti oleh pemerataan pembangunan ekonomi maupun pemerataan pendapatan. Kesenjangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar. Apabila tingkat pembangunan di berbagai daerah di bandingkan, maka pembangunan yang di capai oleh daerah yang maju selalu lebih cepat dari pada yang terjadi pada daerah lain. Hal ini dalam jangka panjang akan menyebabkan tingkat kesenjangan yang cukup lebar (Sukirno, 2007).

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Kesenjangan wilayah selalu ditemukan pada tahap awal pembangunan, yang kemudian semakin membesar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Namun pada tahap yang lebih matang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, akan terjadi keseimbangan antar daerah serta berkurangnya kesenjangan secara signifikan.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan kesenjangan wilayah. Kesenjangan wilayah (*regional disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari

tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Perkembangan wilayah, secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja terampil. Selain itu adanya kesenjangan distribusi pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan menurunnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan dampak berupa kesenjangan distribusi pendapatan. Pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Salah satu indikator untuk mengetahui besarnya pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB juga merupakan suatu indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang. Kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dapat dikatakan semakin baik apabila pertumbuhan PDRB wilayah tersebut juga semakin baik. Adapun PDRB per kapita yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan penduduk antar wilayah. PDRB per kapita adalah nilai tambah bruto untuk setiap penduduk di suatu daerah pada suatu periode tertentu.

PDRB per kapita yang satu dengan yang lain tidaklah sama, ada daerah dengan PDRB per kapita tinggi dan di sisi lain ada daerah dengan PDRB per kapita yang rendah.

Kesenjangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Beberapa penyebab kesenjangan antar wilayah diantaranya, migrasi kapital antar daerah yang tidak seimbang, aglomerasi perkotaan, pengembangan infrastruktur yang bias kota, dan kurangnya keterkaitan antar daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan perkembangan wilayah juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Permasalahan Kesenjangan wilayah antar Kabupaten pemekaran di Provinsi Riau terjadi karena perbedaan besar terhadap kontribusi sektor unggulan, perbedaan potensi daerah seperti perbedaan sumberdaya alam di Provinsi Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun, 1999 beberapa daerah di Provinsi Riau dimekarkan menjadi pembentukan Kabupaten baru, sebagaimana di sebutkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Bab II, pasal (2) – pasal (6), dan pasal (9) tentang Pembentukan, Batas Wilayah, dan Ibu Kota Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Undang-Undang terbaru Nomor 12 Tahun 2009 menyebutkan tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Dari hasil pemekaran daerah tersebut tentunya masing-masing daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Keadaan geografis dan demografis yang dimiliki masing-masing daerah berbeda, demikian pula dengan sumber daya alam yang dimiliki juga berbeda. Hal tersebut membuat setiap daerah di wilayah Provinsi Riau khususnya pada daerah pemekaran memiliki perbedaan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Nilai PDRB yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan masing-masing daerah juga akan berbeda. Berikut adalah jumlah PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2016 (Juta Rupiah) per kabupaten pemekaran berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau : Kabupaten Kuantan Singingi (27.520.560,22), Kabupaten Pelalawan (41.165.592,46), Kabupaten Siak ( 78.943.381,95), Kabupaten Rokan Hulu (29.449.285,41), Kabupaten Rokan Hilir (73.459.605,60), dan Kabupaten Kepulauan Meranti (11.453.445,60).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB dan tingkat kesenjangan antar kabupaten pemekaran di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini kabupaten pemekaran di Provinsi Riau yang terdiri dari Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti di pilih sebagai objek untuk

studi yang berjudul : *Analisis Tingkat Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pemekaran Di Provinsi Riau Tahun 2012-2016*

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu dari uraian latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesenjangan khususnya pada perekonomian wilayah Kabupaten pemekaran Di Provinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 beberapa daerah di Provinsi Riau dimekarkan menjadi pembentukan Kabupaten baru, sebagaimana di sebutkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Bab II, pasal (2) – pasal (6), dan pasal (9) tentang Pembentukan, Batas Wilayah, dan Ibu Kota Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Undang-Undang terbaru Nomor 12 Tahun 2009 menyebutkan tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat tiap-tiap daerah pemekaran tentunya terdapat perbedaan yang menonjol, seperti adanya perbedaan retribusi pendapatan daerah oleh pusat, sumber daya alam, perbedaan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah dan lain sebagainya.

Berdasarkan kondisi tersebut, *problem statement* yang muncul adalah :

- a. Pertumbuhan wilayah yang tidak merata akibat kesenjangan perekonomian pada masing-masing daerah.
- b. Perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan jumlah pendapatan pada sektor ekonomi unggulan pada masing-masing Kabupaten pemekaran yang menyebabkan kesenjangan.

Bertitik tolak dari *problem statement*, maka pertanyaan penelitian/*research question* yang muncul adalah :

- a. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah di tiap daerah kabupaten pemekaran di Provinsi Riau?
- b. Bagaimana tingkat kesenjangan wilayah kabupaten pemekaran di Provinsi Riau berdasarkan Indeks Entropi Theil dan Indeks Williamson?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian kesenjangan antar kabupaten pemekaran di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi antar Kabupaten pemekaran di Provinsi Riau berdasarkan analisis Indeks Entropi Theil dan Indeks Williamson. Adapun wilayah yang mencakup dari penelitian ini diantaranya : Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohul, Kabupaten Rohil, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **1.4 Sasaran Penelitian**

Sasaran dari pelaksanaan penelitian mengenai “Kajian Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pemekaran di Provinsi Riau” adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi tiap daerah Kabupaten pemekaran di Provinsi Riau.
2. Mengetahui tingkat kesenjangan Kabupaten pemekaraan di Provinsi Riau tahun 2012-2016 dengan menggunakan analisis Indeks Entropi Theil dan Indeks Williamson.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Penelitian Bagi Akademik**

Manfaat penelitian mengenai kajian kesenjangan wilayah Kabupaten pemekaran di Provinsi Riau secara umum untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai kesenjangan wilayah dan dapat dijadikan sebagai salah satu aspek penting dalam penyusunan perencanaan kota. Melalui penelitian ini tentu akan menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait kesenjangan perkembangan wilayah.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah**

Melalui penelitian yang ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait kesenjangan wilayah di tiap daerah pemekaran Provinsi Riau, dan membantu dalam merumuskan kebijakan penanganan kesenjangan pembangunan melalui strategi yang dibuat.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup dari penelitian terkait kesenjangan wilayah kabupaten pemekaran di Provinsi Riau berdasarkan dengan Undang- Undang Nomor 53 Tahun, 1999 dan Undang-Undang terbaru Nomor 12 Tahun, 2009 tentang pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota Kabupaten yang meliputi wilayah Kabupaten hasil pemekaran, yaitu : Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Gambar 1.1 Gambar Ruang Lingkup Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**Tabel 1.1 Luas Wilayah Administrasi**

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Km <sup>2</sup> )	(%) Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelalawan	Pangkalan kerinci	12.821,81	14,66%
2	Rokan Hulu	Pasir Pengarayan	7.747,01	8,72%
3	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	8.881,59	10,20%
4	Siak	Siak Sri Indrapura	8.556,09	9,50%
5	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	7.656,03	6,04 %
6	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	3.714,19	4,26%

Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka 2017

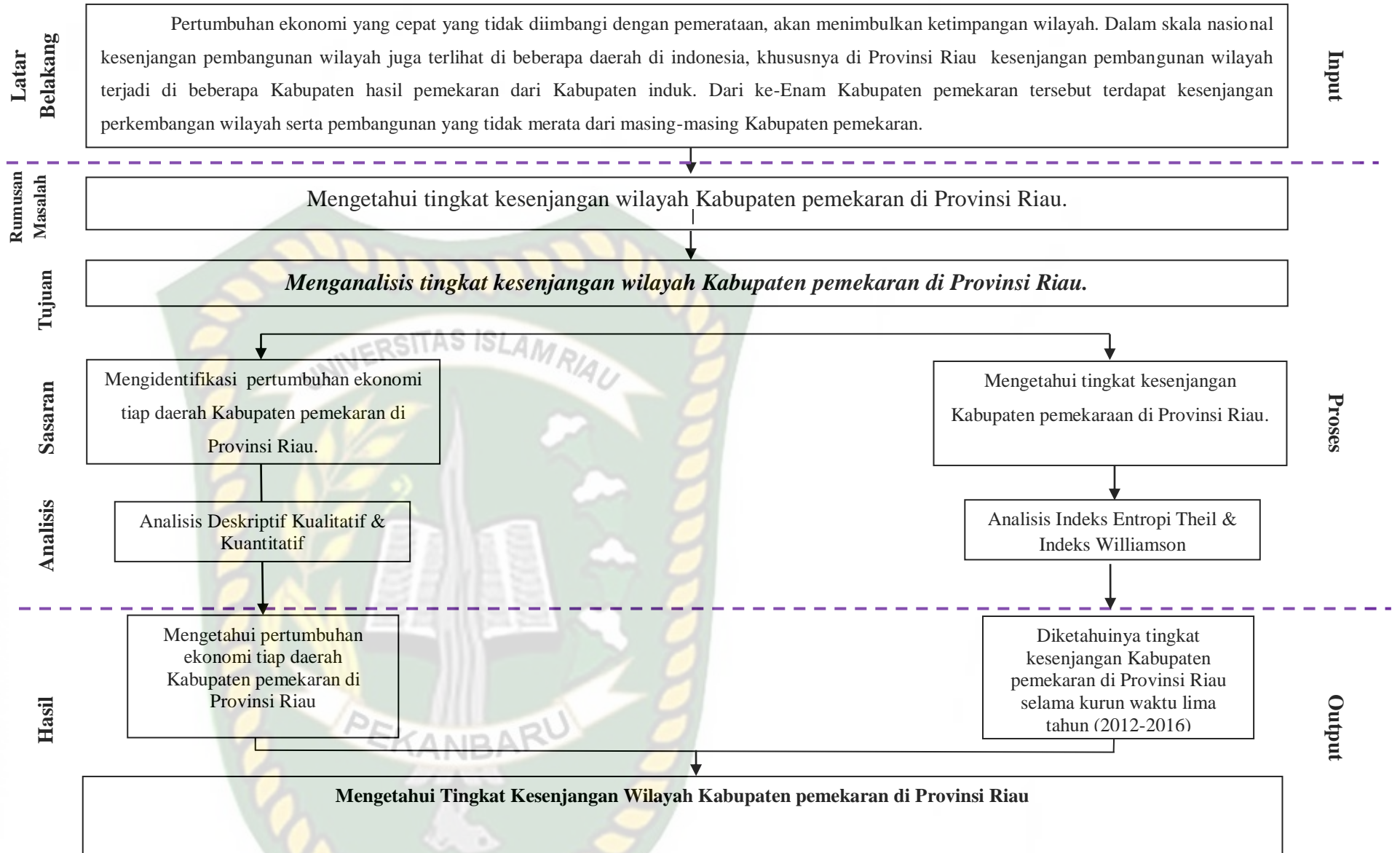
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa wilayah yang paling luas adalah Kabupaten Pelalawan yaitu 12.821,81 Km<sup>2</sup> dengan persentase luas 14,66%. Sedangkan untuk wilayah yang paling kecil adalah Kabupaten Kepulauan meranti yaitu 3.714,19 Km<sup>2</sup> dengan persentase luas 4,26%.

### 1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Dalam Analisis Tingkat Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pemekaran di Provinsi Riau, membahas beberapa materi penting untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi pertumbuhan wilayah yang terfokus pada aspek perekonomian wilayah pada masing-masing Kabupaten pemekaran di Provinsi Riau.
- b. Mengetahui tingkat kesenjangan antar Kabupaten pemekaraan di Provinsi Riau tahun 2012-2016 dengan menggunakan analisis Indeks Entropi Theil dan Indeks Williamson.

### 1.7. Kerangka Berpikir



## **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan yang dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup materi dan wilayah, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Menjelaskan definisi wilayah, definisi perkembangan wilayah, teori perkembangan wilayah, pemekaran wilayah, dan kesenjangan wilayah.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan Metodologi penelitian, Lokasi Penelitian, Bahan dan alat penelitian, Waktu Penelitian, Metode pengumpulan data, dan Metode analisis data, Variabel penelitian, Tahapan Penelitian.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

Bab ini menyajikan deskripsi atau gambaran wilayah penelitian yaitu Kabupaten pemekaran di Provinsi Riau.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab sasaran yang telah ditentukan.

## **BAB VI : SIMPULAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan beberapa rekomendasi atau saran serta kelemahan penelitian.

